

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI AKUNTABILITAS KEUANGAN MASJID STUDI KASUS PADA MASJID DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Muhammad Yusran

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat

e-mail: muhyusran@unsulbar.ac.id

ABSTRACT

The financial accountability of mosques in their accounting practice is still very simple, as well as in financial reporting, so that it is far from the applicable standard provisions. The purpose of this study was to analyze the factors that affect the financial accountability of mosques in West Sulawesi Province. This study used a survey method in the study population, namely all mosques in West Sulawesi Province with incidental sampling techniques and collected as many as 109 respondents from six districts in West Sulawesi Province, then analyzed by multiple regression using SPSS. The results showed that the variables of financial management, internal control, the role of stakeholders, and financial management standards had a positive and significant influence both partially and collectively on the financial accountability variables of mosques. Meanwhile, human resource competence, the use of ICT in this study, does not have a partially significant effect on the financial accountability of mosques. However, it still has a constructive influence simultaneously with the variables of financial management, internal control, the role of stakeholders, and fund management standards on financial accountability. Researchers recommend that local governments in West Sulawesi and related stakeholders improve human resource competence and technology adaptation for mosque managers in managing finances based on the standards of PSAK 45 and PSAK 109.

Key Word: *Financial Accountability, Non-Profit Organizations, Mosque Accounting*

1. Pendahuluan

Profesionalisme dan Akuntabilitas sudah menjadi tuntutan penting pengelolaan organisasi. Profesionalisme dan Akuntabilitas organisasi masjid di seluruh Indonesia, secara kualitas masih rendah. Hal ini juga pernah dikemukakan oleh Sekjen Kementerian Agama RI (*Republika*, 2014), bahwa pada umumnya masjid di Indonesia, dikelola masih secara tradisional serta tidak profesional. Kalaupun terdapat yang baik, jumlahnya juga tidak banyak. Diperkirakan untuk satu juta, hanya terdapat 850 masjid yang tergolong baik. Mayoritas masjid tersebut, pengurus ataupun takmir masjid hanya mengelola kegiatan shalat berjamaah, melaksanakan pengajian serta program aktivitas yang seadanya. Hambatannya antara lain, keahlian SDM, hambatan manajemen program, sehingga memerlukan kedudukan serta keterlibatan dari banyak pihak. upaya tersebut bisa dilakukan melalui program peningkatan mutu pengurus dan manajemen masjid.

Manajemen keuangan harus mengarah pada akuntabilitas keuangan yang mumpuni, akan tetapi masjid umumnya hanya melakukan pembukuan seadanya sampai pada pelaporan keuangannya. Sebagaimana ketentuan dari IAI, bahwa Masjid sebagai organisasi nirlaba harus mempraktikkan PSAK 45 (IAI, 2016). Oleh karena itu masjid dalam hal ini, memiliki kewajiban untuk menyesuaikan laporan keuangan sesuai standar tersebut.

Ketentuan PSAK 45 telah mensyaratkan bahwa laporan informasi keuangan pada organisasi berbentuk nirlaba yakni berupa: informasi keuangan atau laporan keuangan, disertai laporan kegiatan, laporan laba-rugi, serta CaLK. Kondisi keuangan masjid dan segala aktivitas warga dalam masjid tersebut sering menjadi fokus perhatian, karena adanya pemasukan yang disetorkan dari masyarakat, berupa zakat, infaq dan sedekah serta wakaf

(ziswaf). Oleh karena itu, akuntabilitas pengelolaan keuangan masjid secara transparan sering menjadi sorotan. Karenanya pengelolaan keuangan masjid dan pelaporannya, wajib memiliki standar yang baku. Standar keuangan tersebut, yakni PSAK 45 dan PSAK 109. Tidak hanya itu, menurut peneliti dalam pengelolaan keuangan tersebut, masjid dalam melakukan aktivitas pengumpulan dana, penyaluran dana, pelaporannya serta pengembangan dana masjid wajib mencermati dan mematuhi hukum berdasarkan pada Syariah Islam.

Prinsip ibadah dalam islam, mendudukkan masjid tidak hanya sebagai salah satu sentra ibadah, tetapi dapat juga berfungsi sosial dan pelayanan bermasyarakat . Tetapi sayangnya, masyarakat masih mengelolanya secara sederhana dan sukarela, karena dasar anggapan bahwa masjid bukan buat mencari keuntungan. Padahal masjid sebagai organisasi nirlaba merupakan lembaga keagamaan milik masyarakat yang sangat strategis selain sebagai fasilitas ibadah semata. Oleh karena itu, masjid membutuhkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan dalam mengumpulkan dana, mengelola dana, serta melaporkannya. Hal ini karena pengurus masjid mempertanggungjawabkan sarana milik publik.

Prinsip *good corporate governance* bagi masjid dalam hal akuntabilitasnya, harapannya meningkatkan kepercayaan publik dan keyakinan warga. Hal ini berarti meyakinkan masyarakat bahwa, kinerja pengurus masjid dinilai produktif dalam bekerja, sehingga penerimaan akan meningkat (Irianto, 2019). Lewis dalam Bahtiar, dkk(2007) mengemukakan bahwa tata kelola keuangan pada setiap organisasi nirlaba memerlukan atensi yang serius, secara simultan pada rentang waktu yang panjang. Oleh karena itu, akuntabilitas publik dalam aspek pengelolaan serta pelaporan keuangan bagi organisasi nirlaba seperti halnya masjid masih membutuhkan penelitian dan kajian ilmiah yang dapat meningkatkan dan mengembangkannya ke arah yang berkualitas. Utamanya Wilayah Provinsi Sulawesi Barat sebagai daerah yang relatif baru dimekarkan.

2. Kajian Teori

2.1. Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah merupakan bentuk kewajiban bagi pengelola (*agency*) entitas milik publik yang dituntut untuk bertanggungjawab atas hasil kerjanya, karena pengelola (*agency*) telah mengelola sumber daya milik publik. Kegiatan wajibnya adalah melaporkan dan mengungkapkan kegiatan yang telah dilakukan dalam menggunakan sumber daya tersebut yang sesungguhnya milik publik (*principal*).

Akuntabilitas mampu menggambarkan keberhasilan organisasi dan kegagalan organisasi dalam pencapaian sasaran serta tujuannya. Akuntabilitas publik sebagai konsep akan relevan dengan Teori Keagenan (*Agency theory*). Teori keagenan membedakan dua pihak, yang mana fungsional melakukan formal untuk informasi dan hubungan informal untuk kerjasama pengendalian (Kurniawansyah, 2018). Kemudian organisasi jenis ini memiliki karakteristik tersendiri, yang juga mempunyai perbedaan yang jelas dengan organisasi yang berlandaskan bisnis. Sesuai dengan PSAK 45, perbedaannya yakni pada bentuk laporan keuangan, perbedaan cara organisasi nirlaba tersebut mendapatkan sumberdayanya untuk melakukan berbagai hal dalam aktivitas operasinya. Peneliti juga menggunakan Teori *Stewardship* yang menurut, seperti (Morgan, 1996) dalam (Zoelisty & Adityawarman, 2014) mengemukakan bahwa teori *stewardship* bisa pakai untuk penelitian disiplin ilmu akuntansi pada semua organisasi sektor publik, yakni organisasi pemerintahan maupun non profit lainnya (Vargas, 2004) masih dalam (Zoelisty & Adityawarman, 2014). Hal tersebut berdasarkan pada adanya hubungan fungsi dan kebutuhan informasi. Teori *Stewardship* juga relevan karena adanya pemisahan tentang fungsi, pihak yang disebut prinsipal, yakni masyarakat sebagai pemilik *resources* atau sumberdaya. Prinsipal selaku pemilik sumber daya (*capital suppliers*) memberikan kepercayaan (*trust*) atau amanah kepada pihak lain, dalam hal ini pengurus masjid (*steward* atau manajemen) yang dianggap lebih siap dan mampu.

2.2 Manajemen Keuangan

Terry Lewis dalam Bahtiar, dkk (2007) menguraikan bahwa, ruang lingkup manajemen keuangan terdiri dari tahap perencanaan, pengorganisasian, serta bagian yang terpenting yaitu tahap pelaksanaan, kemudian disertai adanya pengendalian, setelah itu diakhiri dengan pengawasan terhadap sumber daya yang ada, sehingga organisasi tersebut dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Bentuk pertanggungjawaban bagi pihak manajemen dalam hal keuangan, yakni selaku agen atau pengelola maka harus mempertimbangkan aspek, seperti: pengelolaan *resources* atau sumber daya, pengelolaan atas risiko, pengelolaan hal-hal yang strategis, dan pengelolaan tujuan. Dengan demikian, peneliti mengajukan hipotesis pertama, yakni Manajemen Keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan masjid.

2.3 Pengendalian Internal

Reeve, *et al* (2013) mengemukakan bahwa, pengendalian internal dapat diartikan, serangkaian prosedur yang dilakukan oleh perusahaan dalam upaya melindungi aset perusahaan, mengolah informasi dengan akurat, serta patuh terhadap standar dan peraturan yang berlaku. Masih menurut Reeve, *et al* (2013) bahwa pengendalian apabila dilakukan secara efektif maka akan membantu kinerja perusahaan menjalankan, mengarahkan aktivitas operasi perusahaan, termasuk akan melindungi penyalahgunaan aset dan pencurian aset. Aktivitas pengendalian yang terencana dengan baik akan menjamin kualitas aset agar efektif dan efisien dalam penggunaannya. Demikian juga jika disertai pelaporan keuangan yang mengikuti standar, maka akan meningkatnya kinerja karyawan, serta kepercayaan publik terhadap organisasi. Dengan demikian, peneliti mengajukan hipotesis kedua, pengendalian internal berpengaruh signifikan pada akuntabilitas keuangan masjid.

2.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Pesatnya kemajuan teknologi, perkembangan informasi yang semakin beragam, adanya modal serta memadainya bahan baku, namun tetap tidak mampu berjalan dengan maksimal, jika tanpa sumber daya yang dikelola secara profesional. Kompetensi dan profesionalisme akan sangat membantu organisasi untuk mencapai tujuannya (Sutrisno, 2017). Kompetensi sumber daya manusia dapat dikelola sedemikian rupa sehingga mampu mendukung kinerja organisasi. Upaya meningkatkan berbagai kompetensi karyawan, seperti dalam aspek kompetensi untuk pencapaian tujuan, kompetensi untuk pemecahan masalah, kompetensi untuk bekerja sama, dan kompetensi bekerja secara tim atau kelompok (*teamwork*).

Organisasi berkewajiban meningkatkan kualitas kompetensi karyawan (SDM). Kualitas SDM yang baik dapat diperoleh melalui, kegiatan seleksi karyawan, penempatan serta kegiatan pembinaan yang terencana, terukur dan terkendali. Dengan demikian, peneliti mengajukan hipotesis ketiga yakni, SDM berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan masjid.

2.5 Peran Stakeholders

Kedudukan stakeholders dalam lingkungan organisasi dapat dibagi dua bagian besar, yang pertama, *stakeholder* yang secara langsung merasakan dan mendapatkan manfaat dan yang kedua, *stakeholders* yang tidak secara langsung merasakan dan mendapatkan manfaat. Masjid sebagai organisasi keagamaan sekaligus dapat menjadi fasilitas sosial dan keagamaan, juga menuntut keterlibatan dan partisipasi semua pihak. Baik pihak yang merasakan dan mendapatkan langsung manfaat dari keberadaan masjid, seperti masyarakat sekitar masjid, demikian juga pihak yang tidak merasakan langsung dan manfaat dari masjid, seperti pemerintah. Dalam hal ini, semua pihak tersebut dapat memiliki akses dan atau kepentingan pada perencanaan, kegiatan masjid dan pengelolaan keuangan. Peran dan kepedulian semua pihak (*stakeholders*) terhadap organisasi masjid akan dapat menjadi pengendali mutu untuk meningkatkan mutu, kegiatan layanan ibadah dan akuntabilitas masjid. Demikian juga yang

di kemukakan Ross, dkk. dalam Fahmi (2018), bahwa peran stakeholder dapat berperan dalam pengendalian dan akuntabilitas organisasi. Dengan demikian, peneliti mengajukan hipotesis keempat yakni, peran stakeholders berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan masjid.

2.6 Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

Adaptasi penggunaan TIK dalam sebuah masyarakat, cepat atau lambat pada akhirnya akan berdampak pada kondisi sosial masyarakat. Hal ini karena perubahan dan kecepatan laju teknologi menjadi bagian penting yang membantu aktivitas dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, *Teori Technology Acceptance Model (TAM)*, yakni teori tentang pemanfaatan dan adaptasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sedemikian penting sebagai upaya untuk melihat, bagaimana penerimaan teknologi informasi, sehingga teknologi informasi tersebut digunakan, yakni dengan melihat minat dan perilakunya. Menurut Alomary & Woollard dalam (Setiawan & Sulistiowati, 2018) bahwa, adaptasi terhadap teknologi sangat tergantung pada persepsi seseorang tentang penerimaan dan pemanfaatan teknologi tersebut, sehingga mampu memberikan kemudahan, serta bermanfaat. Namun, jika menemukan kesulitan dalam mengoperasikan teknologi tersebut, maka semakin sedikit kemauan untuk memakainya. Jadi pendapat peneliti, Teori Technology Acceptance Model (TAM) menggunakan konstruk yang berpengaruh terhadap minat penggunaannya yakni, persepsi dan kemudahan penggunaannya. Dengan demikian, peneliti mengajukan hipotesis kelima yakni, pemakaian TIK memiliki pengaruh yang signifikan pada akuntabilitas keuangan masjid.

2.7 Standar Pengelolaan Keuangan

Pada dasarnya Masjid sebagai suatu organisasi berbentuk nirlaba wajib menerapkan PSAK 45 (IAI, 2016). Namun temuan (Simanjuntak & Januarsi, 2011) yakni, masih ada masyarakat yang berpandangan bahwa organisasi keagamaan tidak membutuhkan *good governance*. Sehingga organisasi keagamaan termasuk masjid, banyak yang menilai tidak transparan dan akuntabel. Organisasi masjid, sering dianggap tidak memiliki bentuk. Kenyataan ini menurut peneliti, masih banyak ditemukan, termasuk praktek keuangan dan pengelolaan keuangan masjid yang hanya mengandalkan kepercayaan dan kerja sukarela semata, sehingga hal ini berdampak pada pengelolaannya sangat sederhana dan tidak mengikuti standar pengelolaan keuangan yang berlaku.

Ikatan Akuntan Indonesia juga menyatakan menetapkan standar bahwa, akuntabilitas publik dalam hal pengelolaan zakat, infaq dan sedekah harus mematuhi standar akuntansi berdasarkan pada PSAK 109 (IAI, 2008). Sebagaimana ketentuan IAI tersebut yakni PSAK Nomor 109 bermaksud untuk memberikan atauran tentang pengakuan, dan pengukuran, serta penyajian maupun pengungkapan terhadap transaksi kategori zakat, infaq dan sedekah. Dengan demikian, peneliti mengajukan hipotesis keenam yakni, Standar pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan pada akuntabilitas keuangan masjid.

3. Metode Penelitian

Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan metode survey, teknik sampling insidental pada enam Kabupaten dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Melalui penyebaran kuesioner kepada responden pada alamat *link* koesioner yang diisi secara *online*. Kuesioner yang berhasil terkumpul sebanyak 109 responden.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan penggunaan *software* SPSS. Adapun formulasi model regresi berganda tersebut seperti berikut ini:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = variabel dependent

α = konstanta

β_1 = koefisien regresi

X = variabel independent

ε = standart error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

1. Pengujian Kualitas Data

Pengujian data yang dilakukan peneliti yakni, uji reliabilitas dan uji validitas. Pengujian validitas yaitu mencermati korelasi pada setiap indikator dengan nilai total skor. Dari hasil perhitungan semua indikator variabel yang diuji dalam penelitian ini masuk kategori valid.

Sedangkan pengujian realibilitas dilakukan dengan melihat konsistensi koefisien *alpha cronbach* pada semua variabel. Hasil yang diperoleh bahwa, nilai *alpha cronbach* pada variabel penelitian ini adalah > dari 0,6. Sehingga instrumen atau koesioner penelitian ini dapat dikatakan realibel.

2. Analisis Deskriptif

Analisis statistik secara deskriptif terdapat pada tabel 1, dengan melihat nilai rentang teoritis yang merupakan titik minimal dan titik maksimal pada setiap variabel dalam kuesioner. Hasil dari jawaban responden adalah merupakan nilai rentang aktual, sebagai hasil dari kondisi aktual di lapangan.

Tabel 4. 1.
Statistik Deskriptif

VARIABEL		TEORITIS			FAKTUAL			Std. Dev.	KET
		MIN	MAX	MEAN	MIN	MAX	MEAN		
X1	Manajemen Keuangan	9	45	27	13	45	33,77	7,408	Tinggi
X2	Pengendalian Internal	13	65	39	21	65	41,83	9,221	Sedang
X3	Kompetensi SDM	7	35	21	11	35	24,95	5,874	Sedang
X4	Peran Stakeholders	5	25	15	7	25	19,08	4,271	Tinggi
X5	Penggunaan TIK	8	40	24	10	40	18,99	5,570	Rendah
X6	Standar Pengeloan	10	50	30	16	50	32,36	8,251	Sedang

Sumber: Data primer, 2020

Rentang skor pada variabel berdasarkan skor maksimal (skor teoritis) yang dikurangi skor minimal (skor teoritis). Selanjutnya hasil pengurangan tersebut, dibagi tiga (sejumlah kategori skor variabel) karena penelitian ini menggunakan tiga kategori yakni skor tinggi, sedang dan rendah. Setelah itu hasil ditambahkan dengan skor minimal, sehingga hasil yang diperoleh tersebut menjadi nilai maksimal pada rentang skor. Berikut ini pada tabel 2 disajikan kategori skor pada variabel:

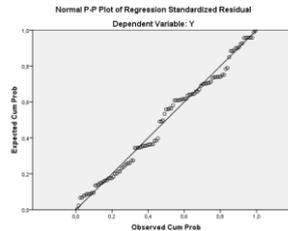
Tabel 2.
Kategori Skor Pada Variabel

VARIABEL		RENTANG SKOR VARIABEL		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
X1	Manajemen Keuangan	9 – 21,00	21,01 – 33,01	33,02 – 45
X2	Pengendalian Internal	13 – 30,33	30,34 – 47,67	47,68 – 65
X3	Kompetensi SDM	7 – 16,33	16,34 – 25,67	25,68 – 35
X4	Peran Stakeholders	5 – 11,66	11,67 – 18,33	18,34 – 25
X5	Penggunaan TIK	8 – 22,00	22,01 – 31,00	31,01 – 40
X6	Standar Pengeloan	10 – 23,33	23,34 – 36,66	36,67 – 50

Sumber: Data primer, 2020

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, dan uji multikolinieritas, serta uji heteroskedastisitas. Hasil yang diperoleh dalam uji normalitas data secara baik telah terpenuhi. Hasilnya dapat dilihat pada grafik 1, yakni dengan memperhatikan penyebaran data (titik) dari variabel independen yang mendekati garis diagonal.



Grafik 4. 1.
Normal P Plot

4. Uji Multikolinieritas

Cara yang baik untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya gejala korelasi diantara satu variabel independen dengan variabel independen yang lainnya yakni dengan menggunakan uji multikolinieritas. Pada pola uji regresi ini, tidak terdapat indikasi korelasi diantara variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini. Uji multikolinieritas dapat dilihat dalam tabel 3, yang hasilnya dengan melihat dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai tolerance.

Berdasarkan tabel 3. hasil uji multikolinieritas memperlihatkan bahwa, nilai VIF < dari 10 dan nilai *tolerance* > 0,10 sehingga disimpulkan tidak ada terjadi Multikolinieritas. artinya nilai tolerance lebih dari 0,1 sedangkan nilai VIF kurang dari 10, maka hal ini berarti tidak terdapat multikolinieritas.

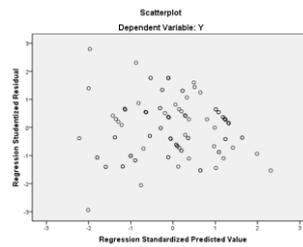
Tabel 4. 3.
Hasil Uji Multikolenieritas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-,433	,767		-,565	,573		
X1	,129	,027	,350	4,753	,000	,498	2,009
X2	,071	,032	,240	2,213	,029	,230	4,351
X3	-,021	,039	-,045	-,540	,590	,385	2,594
X4	,115	,051	,180	2,246	,027	,419	2,387
X5	,017	,037	,035	,457	,648	,469	2,130
X6	,085	,027	,255	3,194	,002	,426	2,349

Sumber: Data primer, 2020

5. Uji Heterokedastisitas

Tujuan dari pengujian heteroskedastisitas adalah untuk melihat ada atau tidak kesamaan varians residual pada pengamatan yang pertama ke pengamatan setelahnya. Apabila terjadi perbedaan hal itu disebut heteroskedastisitas, yang baik jika tidak ada indikasi heteroskedastisitas. Pada grafik 2 *Scatterplot* terlihat pola sebaran di atas dan dibawah 0 (nol) titik-titik tersebut pada sumbu grafik dengan pola yang kurang teratur serta tidak membentuk pola bergelombang melebar atau menyempit, Sehingga dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas dalam penelitian ini.



Grafik 4.2.
Scatterplot

4.2 Analisis Data

Uji Model

Dalam penelitian ini juga dilakukan uji model regresi linier berganda, terdapat jenis uji t, dan uji F serta uji determinasi. Pengujian regresi berganda adalah bertujuan melihat beberapa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. 4.
Hasil Uji Regresi Linear Berganda dan Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-,433	,767		-,565	,573
X1	,129	,027	,350	4,753	,000
X2	,071	,032	,240	2,213	,029
X3	-,021	,039	-,045	-,540	,590
X4	,115	,051	,180	2,246	,027
X5	,017	,037	,035	,457	,648
X6	,085	,027	,255	3,194	,002

Sumber: Data primer, 2020

Data yang diolah melalui SPSS diatas pada tabel 4. Maka dapat dinyatakan dengan persamaan regresi linier berganda seperti dibawah ini:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \varepsilon$$

Pada persamaan linier berganda diatas, secara lengkap akan dijelaskan sesuai dengan ketentuan berikut ini:

- Nilai konstanta (α) sebesar $-0,433$ dapat diartikan bila variabel akuntabilitas keuangan masjid (Y) tidak terdapat pengaruh oleh keenam variabel bebas yaitu; manajemen keuangan, pengendalian intern, kompetensi SDM, peran stakeholders, penggunaan TIK dan standar pengelolaan dana atau dengan pendekatan lain oleh karena itu bernilai nol maka besarnya nilai akuntabilitas keuangan masjid sebesar $-0,433$.
- Koefisien regresi manajemen keuangan ($\beta_1 X_1$) bernilai positif dan signifikan, hal ini menunjukkan adanya pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan masjid artinya apabila manajemen keuangan naik sebesar satu satuan, maka menyebabkan adanya peningkatan akuntabilitas keuangan masjid sebesar $0,129$ atau sebesar $12,9\%$.
- Koefisien regresi pengendalian intern ($\beta_2 X_2$) bernilai positif dan signifikan, hal ini menunjukkan adanya pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan masjid artinya apabila pengendalian intern naik sebesar satu satuan, maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas keuangan masjid sebesar $0,071$ atau sebesar $7,1\%$.
- Koefisien regresi kompetensi SDM ($\beta_3 X_3$) bernilai negatif dan tidak signifikan, hal ini menunjukkan pengaruh yang negatif, artinya bahwa bila kompetensi SDM menurun sebesar satu satuan, maka akan terjadi penurunan akuntabilitas keuangan masjid sebesar $0,021$ atau sebesar $2,1\%$.

- e. Koefisien regresi peran stakeholders (β_4X_4) bernilai positif, hal ini menunjukkan adanya pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan masjid artinya bila peran stakeholders naik sebesar satu satuan, maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas keuangan masjid sebesar 0,115 atau sebesar 11,5 %.
- f. Koefisien regresi penggunaan TIK (β_5X_5) bernilai positif namun dan signifikan, hal ini menunjukkan adanya pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan masjid artinya apabila penggunaan TIK naik sebesar satu satuan, maka akan terjadinya peningkatan akuntabilitas keuangan masjid sebesar 0,017 atau sebesar 1,7 %.
- g. Koefisien regresi standar pengelolaan dana (β_6X_6) bernilai positif dan signifikan, hal ini menunjukkan adanya pengaruh terhadap akuntabilitas keuangan masjid artinya apabila penggunaan standar pengelolaan dana naik sebesar satu satuan, maka akan terjadi peningkatan akuntabilitas keuangan masjid sebesar 0,085 atau sebesar 8,5 %.

Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial dengan uji t dan tingkat taraf signifikansi bisa dipakai dalam menguji sejauhmana adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah, serta menguji hipotesis penelitian. Hasil perhitungan diperoleh t tabel sebesar 1,98 dan hasil perhitungan menggunakan bantuan SPSS pada alpha (α) sebesar 0,05 pada nilai df (*Degree of Freedom*), maka diperoleh nilai t hitung pada masing-masing variabel seperti terlihat pada tabel 5.

Tabel 4.5.
Hasil Uji t

No	Variabel	t hitung	Sig.	Hipotesis
1.	Manajemen keuangan (X1)	4,753	,000	Diterima
2.	Pengendalian intern (X2)	2,213	,029	Diterima
3.	Kompetensi SDM (X3)	-,540	,590	Ditolak
4.	Peran stakeholders (X4)	2,246	,027	Diterima
5.	Penggunaan TIK (X5)	,457	,648	Ditolak
6.	Standar pengelolaan dana (X6)	3,194	,002	Diterima

Sumber: Hasil Penelitian, 2020

Hasil analisis dalam tabel 5. dapat disimpulkan yakni t hitung variabel X1, X2, X4, dan X6 > dari t tabel (1,98), sehingga terlihat adanya pengaruh secara parsial dan signifikan terhadap variabel Y. Sedangkan X3 dan X5 < t tabel dapat dikatakan, tidak terdapat berpengaruh secara parsial terhadap Y. Untuk kriteri pengujian hipotesis yang diterima dengan nilai p value < 0,05 maka terlihat variabel manajemen keuangan (X1), pengendalian intern (X2), peran stakeholders (4), dan standar pengelolaan dana (X6) adalah hipotesis yang diterima, sedangkan variabel kompetensi SDM (X3) dan penggunaan TIK (X5) sebagai hipotesis yang ditolak.

Uji Simultan (Uji F)

Dilakukannya Uji F bertujuan untuk mendeteksi sejauhmana variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Pada Uji dilakukan dengan menggunakan statistik F, yakni dengan ketentuan F hitung > dari F tabel maka dinilai signifikansi. Dengan melihat nilai pada tabel 6 uji F dan taraf signifikansi dengan tingkat alpha 5 %. Oleh karena itu semua variabel independen terdeteksi secara bersamaan mempunyai pengaruh pada variabel akuntabilitas keuangan masjid (Y).

Tabel 6.
Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	504,714	6	84,119	38,276	.000 ^b
Residual	182,408	83	2,198		
Total	687,122	89			

Sumber: Data primer, 2020

Uji Koefisien Determinasi

Pada uji (Koefisien determinasi atau R²) bermaksud untuk mengukur sejauhmana model regresi berganda dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen.

Tabel 8.
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
dimension0 1	,851 ^a	,724	,708	1,476

Sumber: Data primer, 2020

Nilai koefisien determinasi (R²) dapat dilihat antara nol dan satu ($0 < R^2 < 1$). Apabila nilai koefisien determinasi kecil, hal ini berarti kemampuan bagi variabel variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel dependen berarti juga kecil. Namun apabila nilainya semakin mendekati nilai satu hal ini berarti variabel-variabel independen berkontribusi secara memadai untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Dari tabel 6. model *summary* dapat dilihat nilai R² (R Square) sebesar 0,724 artinya kontribusi pengaruh dari variabel independent sebesar 72,4 % sedangkan sisanya sebesar 27,6 % diasumsikan bahwa adanya pengaruh faktor lain atau variabel yang lainnya yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

4.3 Pembahasan

Hasil dalam penelitian ini beserta pengujian hipotesis dapat dijelaskan berikut ini:

1. Variabel manajemen keuangan (X1) dalam pengujian hipotesis pertama menunjukkan pengaruh positif secara signifikan terhadap akuntabilitas keuangan masjid di Sulawesi Barat. Temuan peneliti dapat dijelaskan, bahwa dalam hal manajemen keuangan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan fungsional keuangan masjid sangat menentukan kinerja manajemen masjid untuk akuntabilitas yang profesional. Sehingga Akuntabilitas Masjid sebagai organisasi nirlaba maka harus menjalankan kegiatan perencanaan, operasional dan evaluasi. Masjid secara umum, telah menjalankan aktivitas dan kegiatan berdasarkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan evaluasi. Namun manajemen keuangan masjid belum berjalannya secara lebih optimal dalam hal proses penyusunan anggaran yang optimal, seperti bagaimana mengatur dan penyelenggaraan uang kas masuk dan uang kas yang akan keluar, dan evaluasi terhadap kinerja keuangan masjid. Dengan adanya temuan pengaruh faktor manajemen keuangan yang signifikan dalam penelitian ini terhadap akuntabilitas keuangan, maka hasil ini sejalan dengan *Agency theory* (Teori Keagenan) seperti yang sampaikan (Kurniawansyah, 2018), yakni teori keagenan secara spesifik terkait dengan organisasi dalam hal perlakuan pada informasi, serta berperan penting pada sistem informasi formal. Misalnya, anggaran. Sedangkan fungsi informal nya dalam hal pengawasan manajerial. Hasil dari penelitian ini juga sangat berkaitan dengan hasil penelitian dari (Kanianto, 2016), menguatkan temuan peneliti dimana pengaruh manajemen keuangan terhadap akuntabilitas keuangan masjid terdapat pengaruh yang sangat positif dan signifikan.

2. Variabel pengendalian intern (X2) dalam pengujian hipotesis kedua mempunyai pengaruh yang positif secara signifikan pada akuntabilitas keuangan masjid. Hasil ini dapat dijelaskan, yakni Masjid di Sulawesi Barat sebagai organisasi publik telah menjalankan kegiatan disertai pengendalian intern. Pengendalian intern yang dimaksud dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan melalui rapat keuangan, pengendalian intern pada setiap jenjang kegiatan organisasi seperti pergantian pengurus, kegiatan kontrol sistem pengelolaan keuangan, namun belum sepenuhnya mengikuti standar untuk memperbaiki dan mengevaluasi sistem pengelolaan keuangan dan aset dari kegiatan kontrol tersebut. Menurut peneliti, pengendalian intern yang terprogram dan standar sangat mendukung kualitas informasi keuangan dan keamanan aset agar dapat meningkatkan akuntabilitas. Hal ini sesuai dengan pandangan menurut Reeve, *et al* (2013) pengendalian internal secara arti luas diartikan sebagai adanya serangkaian prosedur serta proses yang digunakan oleh perusahaan untuk perlindungan aset, mengolah informasi yang akurat, serta memastikan terhadap kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Oleh karena ini menurut penulis, pengendalian intern dalam setiap organisasi publik direncanakan sedemikian rupa dalam segala hal yang menjadi aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Berkaitan dengan itu penelitian yang dilakukan oleh (Zoelisty & Adityawarman, 2014), menguatkan temuan peneliti bahwa pengaruh pengendalian bersifat intern pada akuntabilitas keuangan masjid secara signifikan berpengaruh yang positif.
3. Variabel kompetensi SDM (X3) dalam pengujian hipotesis ketiga mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan pada akuntabilitas keuangan masjid. Namun Penelitian dari (Rasyid, Aliyuddin Abd. dan Harmain, 2018), yakni menguji peranan SDM pengelola masjid untuk menganalisis penggunaan prinsip akuntansi upaya untuk menaikkan akuntabilitas pada laporan keuangan masjid, hal ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh sangat signifikan. Temuan berbeda dari peneliti pada masjid di Sulawesi Barat ini, peneliti dapat menjelaskan dari indikator faktor yang diuji dalam penelitian ini, yakni dalam perwujudan visi dan misi serta tujuan organisasi belum maksimal dipahami, pengangkatan pengurus dengan memperhatikan integritas dan komitmen moralnya, serta kurang aktifnya pengurus dalam setiap kegiatan organisasi, utamanya dalam kegiatan penyusunan program kerja. Hal lain yang kurang mendapat perhatian, yakni kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola masjid dan pengelola keuangan. Dalam hal ini peneliti menemukan, secara umum masyarakat dan pengurus masih menganggap bahwa, masjid secara keorganisasian yang sederhana sehingga masih dinilai sebagai wadah atau tempat aktivitas mengabdikan secara sukarela, sehingga SDM yang terlibat, tidak perlu dituntut kompetensi dan keahlian. Bekerja secara sukarela dan hanya untuk pengabdian, ibadah dan gotong royong. Hal ini menyebabkan, komponen kompetensi SDM seperti pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku tidak harus terpenuhi seluruhnya. Tentu akan berdampak pula kepada aspek keterampilan (*skill*) terkait pengelolaan keuangan tidak sesuai standar, karena menilai pengelolaan keuangan yang cukup mudah dan sederhana saja. Agar berjalan optimal, sebagaimana dalam teori *Stewardship* yakni karena adanya hubungan secara fungsi antara pengurus dan masyarakat dalam hal kebutuhan informasi satu sama lain, maka penyandang dana (*capital suppliers* atau *principals*) pemberi kepercayaan (*trust* = amanah) kepada penyandang dana tersebut pada pihak lain dalam hal ini pengurus masjid (*steward* = manajemen) yang dianggap lebih siap secara profesional. Jadi, walaupun organisasi sederhana, namun faktor kesiapan yang profesional tersebut tetap menjaga amanah dan kepercayaan dalam mengelola masjid. Dijelaskan oleh Halim (2013) bahwa sisi kepraktisan dan kemudahan menjadi pertimbangan ta'mir menerapkan sistem akuntansi. Tentu hal ini berdampak pada sisi manajemen dan akuntansi yang menyesuaikan dengan kebutuhan bagi organisasi masjid tersebut. Namun (Simanjuntak & Januarsi, 2011) menjelaskan bahwa, pengelolaan masjid yang tidak profesional banyak didasari oleh pandangan bahwa organisasi keagamaan tidak

memperhatikan tata kelola yang baik (Good Governance), sehingga mengakibatkan praktek pengelolaan organisasi termasuk masalah keuangan hanya bermodalkan kepercayaan (*Trust Agency*) dan mengabaikan pentingnya sistem untuk mewujudkannya. Menurut peneliti hal ini tentu bertentangan dengan prinsip akuntansi yang amanah dan memiliki akuntabilitas.

4. Variabel peran *stakeholders* (X4) dalam pengujian hipotesis mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan pada akuntabilitas keuangan masjid. Dari hasil ini dapat dijelaskan, bahwa tidak hanya pengelola masjid tapi semua pihak harus berperan aktif dan nyata. Seperti, Pemerintah, Auditor, Tokoh masyarakat, dan lain-lain. Akuntabilitas Masjid bukan hanya kepedulian dan tanggungjawab pengurus sepenuhnya, akan tapi juga kepedulian dan tanggungjawab semua pihak. Tanggungjawab manajemen pengelolaan yang profesional dengan kualitas informasi yang memadai sangat membantu pencapaian tujuan. Berhasil sesuai standar dan juga memenuhi harapan publik yakni masyarakat. Penelitian lain yang menguatkan temuan peneliti, yakni penelitian (Rahayu, 2017), yang menemukan pentingnya kerjasama untuk penyediaan informasi dan arus informasi tentang Akuntabilitas pengelolaan masjid, ini akan sangat bermanfaat bagi berbagai pihak, seperti menjalin kerjasama yang sehat dengan media massa dan lembaga non pemerintah, serta pemeriksaan oleh auditor independen. Sejalan menurut Bourne (2009) bahwa *stakeholders* sebagai individu atau kelompok masyarakat dapat saling berpengaruh secara timbal balik untuk keberhasilan dan kegagalan organisasi. Sehingga menurut peneliti, peranan berbagai pihak (*stakeholders*) akan memunculkan inovasi yang produktif sehingga meningkatkan akuntabilitas organisasi.
5. Variabel peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (X5) dalam pengujian hipotesis kelima mempunyai pengaruh yang positif namun secara signifikan tidak berpengaruh pada akuntabilitas keuangan masjid. Dari hasil ini dapat dijelaskan, bahwa umumnya masjid berada di pelosok daerah di Sulawesi Barat, sehingga belum maksimal memanfaatkan dan beradaptasi dengan berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kinerja pengelolaan masjid. Masih kurangnya adaptasi teknologi menjaga keamanan aset, seperti CCTV. Belum memiliki media komunikasi dan informasi, seperti website masjid, e-mail masjid. Sarana perkantoran dan administrasi, seperti komputer, laptop, printer. Hal ini disebabkan karena umumnya masjid terletak di daerah pedesaan, sehingga akses dan kebutuhan akan teknologi masih dianggap tidak terlalu penting dan juga terbatas. Keterbatasan tersebut lebih banyak ditentukan oleh cara pandang dan pemikiran masyarakat bahwa masjid belum membutuhkan pengelolaan dengan sistem teknologi informasi yang modern. Walaupun keuangan dan anggaran bukan masalah. Hal ini masih sejalan dengan pandangan menurut (Simanjuntak & Januarsi, 2011) bahwa masih banyak pandangan masyarakat tentang entitas relegius yang sama sekali tidak membutuhkan pengelolaan (*Good Governance*), tentunya adaptasi teknologi informasi dan komunikasi menjadi penting untuk menunjang kinerja organisasi. Karena kinerja pengelola yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi akan mendukung akuntabilitas keuangan, pembangunan masjid, dan berbagai kegiatan lainnya. Menurut peneliti, fasilitas perangkat teknologi informasi dan komunikasi seperti website masjid, e-mail masjid, komputer, laptop, printer tentu sangat membantu dan dibutuhkan untuk menunjang pengelolaan informasi keuangan masjid. Laporan keuangan masjid dapat tersedia secara daring (*online*) dan diketahui setiap saat (*realtime*). Hal ini tentu menunjukkan bahwa TIK (teknologi informasi dan komunikasi) menjadi alat bantu teknologi yang efektif. Teknologi media pengelolaan informasi dan komunikasi baik akan meningkatkan akuntabilitas yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Namun menurut peneliti, keputusan tersebut tergantung pada penerimaan, minat dan kesadaran yang dimiliki oleh pengelola masjid dan dukungan *stakeholders*. Hal tersebut sejalan dengan teori yang diperkenalkan oleh Davis dalam (Juditha, 2020) menuliskan bahwa,

penerimaan setiap individual dalam pemakaian sistem teknologi informasi berdasarkan pada TAM (Technology Acceptance Model), yakni bagaimana penerimaan sistem TIK yang akan dipakai. Sehingga menurut peneliti, sikap dan respon adaptif pengguna teknologi informasi dan komunikasi, tidak hanya berdasarkan pada manfaat dirasakan oleh penggunanya, tetapi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan.

6. Variabel standar pengelolaan keuangan (X6) dalam pengujian hipotesis keenam mempunyai tingkat pengaruh yang positif dan signifikan pada akuntabilitas keuangan masjid. Penelitian ini sangat berkaitan dengan penelitian (Kurniasari, 2011) tentang pengelolaan dana masjid yang berpedoman pada PSAK 45 dan penelitian (Rahman, 2015) tentang standar akuntansi sesuai PSAK 109 untuk mewujudkan akuntabilitas OPZ. Semua penelitian tersebut mengkonfirmasi tentang pengaruh dan pentingnya kepatuhan pada standar pengelolaan keuangan organisasi nirlaba, yakni masjid. Berdasarkan dengan PSAK 45 dan PSAK 109, tentunya untuk akuntabilitas keuangan masjid juga harus merujuk dengan kedudukannya sebagai organisasi nirlaba. Peneliti dalam penelitian ini menemukan masih banyaknya masjid yang tidak melaporkan data keuangan secara lengkap dan sesuai standar yakni PSAK 45 dan PSAK 109. Hal tersebut juga sesuai temuan dari (Kurniasari, 2011) menyimpulkan laporan keuangan yang disusun masih sangat terbatas hanya pada laporan keuangan berupa arus kas saja belum mengaju pada PSAK No. 45. Intinya menurut penulis dari hasil tersebut bisa dijelaskan, bahwa penerapan standar pengelolaan dana masjid berdasarkan PSAK 45 tentang penyusunan laporan keuangan dan PSAK 109 tentang standar pengelolaan zakat dan infak atau sedekah wajib diadaptasi, karena akan berdampak pada akuntabilitas keuangan. Sekalipun dalam kenyataannya penerapan pengelolaan dan pelaporan keuangan masjid tidak dilakukan secara baku dan tidak sesuai ketentuan PSAK 45 dan PSAK 109. Namun seharusnya masjid menerapkan dan mengkombinasikan PSAK 45 dan PSAK 109 dengan menyesuaikan diri secara bertahap. Temuan peneliti, bahwa pengelola masjid di Sulawesi Barat telah menekankan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang sangat fundamental dalam pengelolaan keuangan masjid, meskipun telah ada pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana dengan akuntansi yang sederhana untuk semua aktivitas yang terkait. Aktivitas tersebut dibuktikan dengan publikasi informasi uang masuk dan keluar serta saldo keadaan kas yang dimiliki masjid sebagai laporan keuangan. Kegiatan ini biasanya dilaporkan setiap pekannya saat acara jumat dan ditempelkan di papan informasi masjid, sehingga masyarakat atau jamaah memiliki rasa percaya terhadap uang yang diserahkan pada pengurus masjid.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen keuangan menjadi faktor yang memiliki pengaruh signifikan pada akuntabilitas keuangan masjid di Provinsi Sulawesi Barat. Pada penelitian ini hasilnya menyimpulkan bahwa manajemen keuangan masjid di Provinsi Sulawesi Barat telah menjalankan manajemen keuangan yang akuntabel, walaupun belum optimal.
2. Pengendalian intern merupakan satu faktor yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan masjid di Provinsi Sulawesi Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian yang bersifat intern telah dilakukan dalam segala aktivitas di masjid walapun belum terencana dan terprogram dengan baik.
3. Kompetensi SDM menjadi salah satu faktor yang tidak berpengaruh secara signifikan pada akuntabilitas keuangan masjid di Provinsi Sulawesi Barat. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa umumnya masyarakat dan pengurus menganggap bahwa masjid merupakan wadah pengabdian secara sukarela. Sehingga SDM yang terlibat tidak perlu

- dituntut kompetensi keahlian yang spesifik. Namun SDM dinilai tetap sebagai faktor yang penting secara keseluruhan untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan masjid.
4. Peran *stakeholders* adalah salah satu faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan masjid di Provinsi Sulawesi Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya peran semua pihak dalam pengelolaan masjid, karena masjid sebagai sarana ibadah, sekaligus berfungsi sosial keagamaan.
 5. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah salah satu faktor yang tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan masjid di Provinsi Sulawesi Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa umumnya adaptasi teknologi informasi dan komunikasi bagi masjid belum dimanfaatkan secara maksimal, karena perangkat TIK tersebut dinilai belum sepenuhnya bermanfaat menunjang kinerja pengelolaan masjid.
 6. Standar pengelolaan keuangan adalah salah satu faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas keuangan masjid di Provinsi Sulawesi Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar pengelolaan dana masjid berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109 untuk masjid dianggap penting. Namun, pengelolaan dana masjid dan pelaporannya masih sangat sederhana. Pengelolaan keuangan masjid belum sesuai standar PSAK 45 dan PSAK 109.

5.2 SARAN

Akuntabilitas keuangan masjid di Wilayah provinsi Sulawesi Barat harus lebih ditingkatkan kualitasnya melalui peningkatan kualitas SDM, penerapan teknologi serta menerapkan standar pengelolaan keuangan organisasi nirlaba. Karena itu peneliti merekomendasikan kepada pemerintah daerah di Sulawesi Barat dan stakeholders terkait untuk meningkatkan kompetensi SDM dan adaptasi teknologi bagi para pengelola masjid dalam mengelola keuangan berdasarkan standar PSAK 45 dan PSAK 109. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan pihak terkait.

Referensi

- Al-Quran. (2020). Al-Qur'an Hafalan Mudah (Al-Huffaz). Bandung: Cordoba
- Bahtiar, dkk. (2007). Manajemen Keuangan Organisasi Masyarakat Sipil (Terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Terjemahan.
- Bourne, Lynda. (2010). Stakeholder Relationship Management. Stakeholder Management Pty Ltd.
- Fahmi, Irham. (2018). Pengantar Manajemen Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Halim, Abdul. (2013). Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat.
- Moehariono. (2012). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: Grafindo Persada.
- Republika, (2014). <https://republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/nfzumq11/masih-banyak-masjid-dikelola-tak-profesional>
- IAI. (2008). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109*. 109, 1–25. <https://staff.blog.ui.ac.id/martani/files/2011/04/ED-PSAK-109.pdf>
- IAI. (2016). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45*. *Ikatan Akuntan Indonesia*, 243.
- Irianto, M. F. (2019). *IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM UPAYA MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN WAKAF TUNAI (Studi Kasus Di Masjid At – Taqwa Kota Batu Jawa Timur)*. 194.
- Juditha, C. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Desa (Studi di Desa Suka Datang, Curup Utara, Rejang Lebong, Bengkulu). *E-Journal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika*. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/jpkop/article/view/2502>
- Kanianto, A. W. (2016). *Pengaruh Manajemen Keuangan Terhadap Akuntabilitas Laporan Masjid*. Thesis Pa. <http://repository.upi.edu/26652/>
- Kurniasari, W. (2011). Transparansi Pengelolaan Masjid dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45). *Muqtasid: Jurnal*

- Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 135.
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.135-152>
- Kurniawansyah, D. (2018). Teori Agency Dalam Pemikiran Organisasi ; Pendekatan Positivist Dan Principle-Agen. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 3(2), 435–446.
<https://doi.org/10.31093/jraba.v3i2.122>
- Rahayu, R. A. (2017). Tranparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 631–638.
<https://doi.org/10.22219/jrak.v4i2.4948>
- Rahman, T. (2015). AKUNTANSI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141.
<https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Rasyid, Aliyuddin Abd. and Harmain, H. (2018). Analisis Penerapan Prinsip Akuntansi dalam Meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Masjid di Indonesia. In *Lembaga Penelitian Dan Pengadain Kepada Masyarakat (LP2M). UIN Sumatera Utara* (Vol. 151, Issue 2). <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/9377>
- Setiawan, A., & Sulistiowati, L. H. (2018). Penerapan Modifikasi Technology Acceptance Model (Tam) Dalam E-Business. *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Jasa*, 10(2), 171.
<https://doi.org/10.25105/jmpj.v10i2.2277>
- Simanjuntak, D. A., & Januarsi, Y. (2011). Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh 2011, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh , 21-22 Juli 2011*, 21–22.
- Zoelisty, C., & Adityawarman. (2014). Amanah Sebagai Konsep Pengendalian Internal Pada Pelaporan Keuangan Masjid. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 3(3), 1–12.